

PERSEPSI PEMIMPIN NEGARA TERHADAP ASEAN DAN INISIATIF INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Agus Haryanto, Kholifatuz Saadah

Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Penelitian ini berusaha menjawab relasi antara persepsi pemimpin dan perilaku negara. Secara spesifik, penelitian ini berusaha menyajikan bagaimana persepsi pemimpin Indonesia terhadap ASEAN dan pengaruhnya terhadap inisiatif Indonesia di Asia Tenggara. Dari penelitian ini, persepsi pemimpin Indonesia terhadap ASEAN memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku Indonesia di Asia Tenggara. Di periode kepemimpinan Soeharto, Megawati, dan SBY, para pemimpin menempatkan ASEAN dalam lingkungan konsentris pertama, atau dapat disebut ASEAN sebagai organisasi terpenting bagi Indonesia. Selama periode ini, Indonesia memiliki berbagai inisiatif dalam mengembangkan ASEAN dan mengambil tindakan untuk mendorong ASEAN lebih otonom. Sementara itu, di periode kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo dimana mereka memiliki anggapan ASEAN bukan merupakan organisasi terpenting, inisiatif Indonesia di kawasan berkurang secara drastis.

Kata Kunci: *Indonesia, Persepsi, Pemimpin, ASEAN, dan Asia Tenggara*

A. Pendahuluan

Indonesia seringkali disebut sebagai pemimpin alamiah untuk ASEAN (Emmers, 2014; Hadi, 2012). Status ini merujuk pada empat faktor yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, posisi strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Empat faktor ini menjadikan Indonesia secara *de facto* diterima sebagai bagian penting bagi ASEAN. Meski demikian, posisi Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN menurun pada saat krisis 1997/1998 yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Indonesia baru menempati kembali posisinya sebagai pemimpin natural ASEAN pada saat SBY terpilih menjadi presiden pada tahun 2004 (Emmers, 2014: 155).

Meskipun secara alamiah Indonesia adalah pemimpin di ASEAN, namun tidak semua elit politik Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian terpenting dalam politik luar negerinya. Sebagai contoh Menlu Adam Malik, di era Orde Baru, menyatakan ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia. Pada waktu itu, ASEAN menempati lingkaran konsentris pertama dalam politik luar negeri. Namun, situasi berubah pada Era Reformasi, beberapa pihak mempertanyakan tentang relevansi penempatan ASEAN sebagai

konsentris pertama politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan selama lebih dari 40 tahun pendirian ASEAN sejak 1967, Indonesia seolah-olah tersandera dalam “sangkar emas (*golden-cage*)” (Anwar, 1994). Dengan menempatkan ASEAN sebagai prioritas, Indonesia dianggap kurang fokus pada kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Persepsi pemimpin Indonesia terhadap ASEAN telah menjadi diskusi dalam berbagai kajian politik luar negeri. Sebagian pihak menganggap ASEAN sebagai tangga pertama Indonesia untuk berperan dalam kancah politik internasional. Secara detail, kajian yang dilakukan oleh Syamsul Hadi (2012: 153-156) menggambarkan bagaimana perdebatan tersebut, dengan kasus ketika Indonesia akan meratifikasi Piagam ASEAN. Pada waktu itu, pemerintah memiliki keinginan untuk memiliki peran yang lebih besar dalam ASEAN dengan cara ratifikasi *ASEAN Charter*. Pada awalnya, Mantan Menlu Hasan Wirayuda memiliki argumen bahwa meratifikasi Piagam ASEAN akan sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN. Dengan piagam tersebut, ASEAN akan menjadi organisasi regional yang kuat sehingga kerja sama antar negara akan semakin intensif. Menlu juga meyakinkan berbagai pihak bahwa Piagam tersebut akan membuat kawasan Asia Tenggara stabil. Dalam stabilitas tersebut, Indonesia dapat memperkuat dan meningkatkan kerja sama di beberapa sektor di Asia Tenggara baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. Dengan stabilitas tersebut, Indonesia juga akan dipandang sebagai negara yang berpengaruh di kawasan.

Pendapat Menlu Hasan Wirayuda mendapatkan penolakan dari dalam negeri. Ada dua kelompok yang menentang piagam ASEAN. Yang pertama diwakili oleh Jusuf Wanandi yang menganggap substansi Piagam ASEAN tidak komprehensif, terutama dalam mendorong penegakan HAM dan demokrasi di ASEAN. Kelompok kedua adalah LSM dan beberapa anggota parlemen yang menganggap keterlibatan Indonesia di ASEAN selama ini tidak memberi dampak yang luas untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia.

Merunut pada sejarah, penelitian Weinstein (1972) telah mengungkap bagaimana para pemimpin negara memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan posisi Indonesia di Asia Tenggara. Weinstein, dalam penelitiannya, mengajukan pertanyaan kepada 53 pemimpin negara mengenai peran Indonesia di Asia Tenggara mendapatkan jawaban 53 persen (28 orang) merasa Indonesia harus segera memiliki peran di Asia Tenggara, kemudian 36 persen (19 orang) merasa perlu memiliki peran tetapi tidak segera, dan 11 persen (6 orang) menyatakan peran Indonesia di Asia Tenggara tidaklah penting (Weinstein, 1972: 380-382).

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana persepsi elit politik Indonesia berpengaruh terhadap inisiatif Indonesia di Asia Tenggara. Penelitian ini

dilakukan dalam rentang kepemimpinan Soeharto sampai dengan Susilo Bambang Yudhono (SBY). Selanjutnya, penelitian ini akan berguna untuk menganalisis bagaimana perilaku Indonesia di era kepemimpinan selanjutnya.

Persepsi Pemimpin dan Pengaruhnya

Persepsi merupakan variabel penting dalam politik luar negeri, karena persepsi yang berasal dari pembuat kebijakan terhadap suatu hal menentukan arah pemikiran dan kebijakan seorang aktor. Menurut Novotny (2010) persepsi bisa didefinisikan sebagai konsep yang menjabarkan konstruksi dari realita yang dilihat oleh individu yang terlibat dalam penyusunan kebijakan luar negeri (Novotny, Torn between China and US).

Selama ini, Menurut Hudson (2005), sebenarnya ada tiga karya paradigmatis yang bisa dikatakan sebagai landasan dalam menganalisis kebijakan luar negeri sebuah negara. Pertama, Pengambilan keputusan (*Decision Making Process*) sebagai Pendekatan Studi Politik Internasional oleh Snyder, Bruck, dan Sapin (1954: juga dalam Snyder et al, 1962; yang dicetak ulang pada tahun 2002.). Kedua, "Pre-teori dan Teori Kebijakan Luar Negeri" oleh Rosenau (bab buku ditulis pada tahun 1964 dan diterbitkan dalam Farrell, 1966). Ketiga, Man-Milieu Hubungan Hipotesis dalam Konteks Politik Internasional oleh Sprout dan Sprout (1956).

Perkembangan dari ketiga karya paradigmatis ini melahirkan perdebatan dalam analisis politik luar negeri mengenai siapa yang sebenarnya menjadi faktor penentu dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Bagi penganut *decision making process*, maka faktor penentu dalam kebijakan luar negeri harus dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, penganut Teori Kebijakan Luar Negeri seperti Rosenau memiliki argumen kebijakan luar negeri dipengaruhi situasi politik internasional dan situasi domestik. Dan, yang terakhir, penganut faktor manusia seperti Sprout dan Sprout, menganggap faktor pemimpin lah yang menjadi penentu utama kebijakan luar negeri.

Snyder dan kawan-kawan menganggap politik luar negeri merupakan sekumpulan pembuatan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melihat politik luar negeri sebagai sebuah "organizational behaviour". Sementara itu, Rosenau menekankan pada apa yang disebut Hudson (2005) sebagai "actor specific theory". Rosenau menekankan pada penggunaan teori yang dapat menghubungkan antara prinsip utama sebuah negara dengan realitas politik internasional yang kompleks. Untuk itu, Rosenau menyarankan untuk menyatukan informasi dari berbagai level analisis, yaitu dari individu sampai sistem internasional dalam memahami kebijakan luar negeri.

Sementara itu Sprout dan Sprout (1965) lebih menekankan pada "actor general theory". Dia menyarankan menggunakan psyco miliue, yang diartikan olehnya "The psycho-milieu is the international and operational environment or context as it is perceived and interpreted by these decisionmakers." Jadi, dalam pandangan Sprout and Sprout, analisis politik luar negeri dapat dilakukan dengan bagaimana pengambil kebijakan mempersepsikan situasi.

Pemimpin, bagaimanapun, menerjemahkan berbagai aturan, situasi, dan nilai – nilai yang dianut sebuah negara sebagai bahan pembuatan kebijakan luar negeri. Sebagai contoh politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara diterapkan secara berbeda di periode kepemimpinan Soekarno (1945-1966) dan Soeharto (1966-1998). Soekarno, yang menerima surat dari Tunku Rahman, PM Malaysia, untuk pembentukan organisasi regional memilih untuk menolak karena menganggap perjuangan politik Indonesia dapat diwujudkan melalui kebersamaan Indonesia dengan lingkup organisasi yang lebih besar yaitu Asia Afrika (Gunadirja et al, 1998). Sementara itu, dalam benak Soeharto, Asia Tenggara adalah wilayah terdekat Indonesia. Kemerdekaan dan pembangunan Indonesia harus dimulai dari wilayah terdekat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan dokumen negara, jurnal, dan berita elektronik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Pemimpin Indonesia terhadap ASEAN

Secara ringkas, penulis menggambarkan persepsi pemimpin Indonesia terhadap ASEAN dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persepsi Pemimpin Indonesia terhadap ASEAN

<p>Era Soekarno</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Soekarno memandang Asia Tenggara sebagai wilayah yang pentingØ Sikap konfrontasi dengan Malaysia atas pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, yang dilihat oleh Soekarno sebagai ikhtiar negara Barat, terutama Inggris untuk membentuk kekuatan neokolonialisme di Asia Tenggara. <p>Era Soeharto</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Dalam hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara, pada periode tahun 1966 an, Soeharto mulai menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan mulai menaruh perhatian khusus terhadap regionalisme Asia Tenggara.Ø Tahun 1967 sebagai salah satu pendiri ASEANØ Pada era tahun 1980 an, Soeharto mulai menempatkan ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama (<i>concentric circle</i>) dalam politik luar negerinya.Ø <i>Bali Concord I</i> <p>Era Habibie</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Politik luar negeri Indonesia di ASEAN praktis tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan Habibie lebih banyak disibukkan oleh berbagai persoalan domestik <p>Era Abdurrahman Wahid</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Politik luar negeri Indonesia lebih menekankan kepada hubungan dengan banyak negara dan tidak memberikan banyak perhatian kepada ASEAN sebagai pilar utama dari politik luar negeri Indonesia <p>Era Megawati Soekarno Putri</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Politik luar negeri Indonesia kembali lebih menekankan kepada sentralitas ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri IndonesiaØ Tahun 2003-2004 serta usulannya bagi pembentukan <i>ASEAN Security Community</i> yang disepakati pada KTT Bali bulan Oktober 2003 atau <i>Bali Concord II</i> <p>Era Soesilo Bambang Yudhoyono</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Menekankan sentralitas ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri IndonesiaØ <i>Bali Concord III</i> <p>Era Joko Widodo</p> <ul style="list-style-type: none">Ø Menekankan ASEAN Centrality pada dinamika Indo-Pasifik

Diolah oleh Penulis

Apa yang membuat Indonesia memiliki perbedaan pandangan dalam ASEAN? Dewi Fortuna Anwar menyatakan terletak pada kepentingan nasional. Sebagian pemimpin Indonesia menganggap kepentingan nasional merupakan hal yang terpenting, sedangkan yang lain menganggap kepentingan nasional penting namun harus melalui jembatan ASEAN. Pendapat pertama menganggap ASEAN hanyalah satu dari sekian banyak organisasi internasional yang diikuti Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu menekankan kebijakan luar negeri pada ASEAN (Anwar, 1994: 149).

Meskipun perhatian pemimpin Indonesia terhadap ASEAN sempat menurun di awal reformasi, pada era Megawati Soekarno Putri, ASEAN kembali mendapatkan porsi besar sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era Megawati mengacu pada TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang dalam Bab IV tentang Arah Kebijakan khususnya tentang Hubungan Luar Negeri menekankan poin, "meningkatkan kerja sama dalam segala bidang, dengan negara berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan".

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di ASEAN di Era Megawati memiliki beberapa catatan keberhasilan seperti keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2003-2004 yang berhasil mengusulkan pembentukan *ASEAN Security Community* pada KTT Bali bulan Oktober 2003. Kesepakatan ini kemudian dikenal sebagai *Bali Concord II* yang menyatakan komitmen politik negara - negara anggota ASEAN untuk menjadi *ASEAN Community* pada tahun 2015.

Pada *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* ke-36 di Phnompenh bulan Juni 2003, Indonesia mengusulkan dibentuknya *ASEAN Security Community (ASC)* sebagai salah satu pilar dari konsep *ASEAN Community*. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan bahwa konsep ASC yang diajukan oleh Indonesia adalah untuk mereformasi *state of mind* ASEAN guna lebih menyeimbangkan kerjasama yang selama ini lebih menekankan kerjasama ekonomi kepada kerjasama menciptakan stabilitas keamanan. ASC merupakan kerjasama yang ideal di dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, melalui ASC Indonesia berharap dapat kembali memiliki peran *strategic centrality* di dalam ASEAN dan pada gilirannya ASEAN akan berperan sebagai *diplomatic centrality* di dalam komunitas internasional (Prihatyono, 2009: 2).

Selain itu, Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang dapat memainkan peran penting di ASEAN sebagaimana dilakukan sebelum Era Reformasi. Bagi Indonesia pembentukan ASC tidak saja dijadikan momentum peran penting kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, akan tetapi juga merupakan awal untuk

menunjukkan bahwa ASEAN kembali menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan Indonesia menempatkan kembali posisi instrumentalnya dalam ASEAN akan menjadi modal tambah bagi peningkatan politik luar negeri Indonesia terhadap negara di luar kawasan ASEAN.

Jika dibandingkan dengan era pemerintahan Megawati, era pemerintahan SBY terkait dengan ASEAN bisa dikatakan jauh lebih damai. SBY sendiri mengusung prinsip *thousand friends, zero enemies* yang membuat Indonesia cenderung “terlihat” lebih bersahabat di dalam konstelasi dunia internasional terutama di kawasan Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan SBY, ASEAN kembali ditekankan sebagai lingkaran konsentris pertama dalam politik luar negeri Indonesia, sehingga kembali memperlihatkan bahwa ASEAN merupakan fokus utama di dalam dinamika kebijakan luar negeri dari Indonesia.

Namun kondisi ini justru sedikit berbeda di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi menyatakan bahwa model diplomasi yang akan dilakukannya (pada masa pemerintahan periode pertama) merupakan model diplomasi pro-rakyat; berbeda dengan model diplomasi yang dilakukan SBY dengan pendekatan yang cenderung internasionalisme (Patriadi et al., 2018: 261). Lebih lanjut, Jokowi juga terlihat lebih tegas di dalam menindak pelanggaran yang dilakukan di kawasan teritori milik Indonesia. Jika dibandingkan, pada era SBY juga cukup banyak pelanggaran teritori laut oleh nelayan asing, namun masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan pengadilan; merujuk pada prinsip SBY *thousands friends zero enemies* (Patriadi et al., 2018: 262). Sedangkan pada era Jokowi justru penindakan tegas seperti penenggelaman kapal milik nelayan asing yang melanggar kawasan teritori Indonesia marak dilakukan. Tindakan ini tentu menimbulkan reaksi yang keras terutama dari negara-negara tetangga.

Kondisi tersebut terkesan memberikan gambaran bahwa Jokowi memiliki kecenderungan yang cukup berbeda jika dibandingkan pada era pemerintahan sebelumnya. Prashanth Parameswaran, editor senior dari *The Diplomat* menyampaikan bahwa memang ada tanda-tanda bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi memiliki kecenderungan untuk lebih berorientasi domestik dan bilateral jika dibandingkan sebelumnya (Drajat, 2019: 73). Walaupun demikian, bukan berarti pada akhirnya ASEAN “ditinggalkan” oleh Jokowi dalam pemerintahannya. Secara sejarah, Indonesia merupakan “pemimpin” di ASEAN, tidak bisa begitu saja diabaikan. Terbukti dengan pernyataan resmi dari Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan 2018 lalu yaitu “Indonesia akan terus bekerja bersama dengan negara-negara di kawasan, untuk mengembangkan payung kerjasama Indo-Pasifik,” (Drajat, 2019: 75). Pernyataan dari Menlu Retno ini kemudian juga

didukung dengan pernyataan dari Presiden Jokowi sendiri pada ASEAN-India Commemorative Summit in January 2018 ke-32 lalu. Jokowi menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kerjasama Indo-Pasifik karena inklusif dan mendukung ASEAN Centrality (Drajat, 2019: 75). Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti yang menggambarkan bahwa ASEAN tetap menjadi fokus di dalam dinamika kebijakan luar negeri milik Indonesia.

2. Persepsi dan Inisiatif Indonesia di Asia Tenggara

Bagaimana relasi persepsi pemimpin dengan inisiatif di kawasan?

Penelitian ini menunjukkan dalam Tabel 2 mengenai relasi persepsi pemimpin dengan inisiatif di kawasan. Dalam Tabel 2, terlihat bagaimana peran Indonesia di kawasan meningkat ketika pemimpin memiliki persepsi ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri. Di era kepemimpinan Soeharto (1966-1998), Megawati (2001-2004), dan SBY (2004-2014), Indonesia memiliki berbagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik di kawasan dan mendorong transformasi ASEAN menjadi sebuah organisasi di kawasan.

Tabel 2. Persepsi terhadap ASEAN dan Inisiatif Indonesia di Kawasan

Pemimpin	Periode	Persepsi terhadap ASEAN	Inisiatif Indonesia
Soeharto	1963-1998	ASEAN sebagai konsentris utama	1967 Ø Salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
			1971 Ø Berperan penting dalam penerapan ZOPFAN (<i>Sotheast Asian Zone of Freedom, and Neutrality</i>) dan NFZ (<i>southeast Asian Nuclear Freezone</i>)
			1976 Ø Pada KTT ASEAN di Bali Indonesia mengusulkan terbentuknya kerja sama keamanan dan latihan militer bersama
			1979 Ø menyediakan pulau Galang di Riau untuk menampung pengungsi konflik Vietnam
			Maret 1981

Ø Presiden Soeharto mengingatkan pada ASEAN bahwa konflik Kamboja adalah sengketa antara Vietnam dan Tiongkok, bukan antara ASEAN dan Vietnam

1980-an

Ø Indonesia ikut berperan penting dalam membendung pengaruh Tiongkok dan Uni Soviet

Maret 1984

Ø Menlu Vietnam Nguyen Co Thach mengakui hanya Indonesia yang mampu menjembatani ASEAN dan Indochina dalam menyelesaikan masalah Kamboja

April 1984

Ø Indonesia menyatakan kepada PBB bahwa solusi untuk masalah Kamboja adalah terbentuknya negara Kamboja yang berdaulat

Desember 1987

Ø Indonesia mengirim satuan tugas TNI Angkatan laut ke Filipina untuk membantu pengamanan KTT ASEAN

1988

Ø Memprakarsai terbentuknya *Jakarta Informal Meeting (JIM)* dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja

1992

Ø Mengirim pasukan perdamaian ke Kamboja untuk mencegah konflik

1993

Ø Menjadi penengah antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro

1995

Ø Berperan aktif dalam pembentukan *ASEAN Regional Forum (ARF)*

Habibie	1998-1999	Tidak diketahui	-
Abdurrahman Wahid	1999-2001	ASEAN bukan konsentris utama	-
Megawati	2001-2004	ASEAN sebagai konsentris utama	<p>2002 <i>Declaration of Conduct</i> Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dengan Tiongkok</p> <p>2003 Ø Memperjuangkan dimasukkannya elemen – elemen penting dalam demokratisasi dan penghormatan serta penegakan HAM dalam kerja sama politik dan keamanan</p> <p>2004 Ø Mengusulkan pembentukan Komunitas ASEAN (<i>ASEAN Community</i>) yang mencakup bidang keamanan, sosial budaya dan ekonomi</p>
SBY	2004-2014	ASEAN Konsentris utama	<p>Januari 2007 Ø Menyusun dan menandatangani <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)</i> sebagai upaya peningkatan kerja sama pencegahan dan penanggulangan terorisme</p> <p>2007 Ø Menyelenggarakan ASEAN Forum sebagai dukungan terwujudnya Komunitas ASEAN 2015</p> <p>2011 Ø Ratifikasi traktat kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selama Indonesia menjadi ketua ASEAN Ø Menengahi sengketa bilateral Kamboja dan Thailand dalam perebutan kuil Preah Vihear Ø <i>Shuttle diplomacy</i> dalam sengketa laut Tiongkok Selatan</p> <p>September 2012</p>

			Ø Mengusulkan draft Nol Kode Tata Berperilaku atau <i>Code of Conduct</i> (CoC) Laut Tiongkok Selatan untuk mempercepat penyelesaian sengketa
Jokowi	2014-sekarang	ASEAN bukan Konsentris Utama	Ø Peran Jokowi banyak berada pada pertemuan bilateral menjelang KTT ASEAN untuk kepentingan Indonesia sendiri 2018 Ø Menekankan peran ASEAN dalam konteks ASEAN Centrality dalam payung kerjasama Indo-Pasifik

Diolah oleh Penulis

Sementara itu di era Habibie (1998-1999), posisi ASEAN dalam politik luar negeri tidak begitu jelas karena Habibie fokus pada isu domestik. Sedangkan pada era Abdurrahman Wahid (1999-2001), Indonesia menganggap ASEAN tidak begitu penting. Hal ini terlihat dari kebijakan luar negeri pemerintah yang mengusulkan adanya Pasifik Barat di sela – sela pertemuan pemimpin ASEAN. Sebenarnya, pada era Jokowi (2014-sekarang) Indonesia juga sedang menjalankan arah politik luar negeri yang mirip dengan era Abdurrahman Wahid. ASEAN tidak lagi dipandang sebagai lingkaran konsentris utama di dalam kebijakan luar negeri Indonesia, walaupun pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia masih melihat ASEAN sebagai organisasi regional yang penting di kawasan. Jokowi dengan Global Maritime Fulcrum-nya memiliki kecenderungan ke arah IORA, bahkan Indonesia menjadi ketua IORA pada tahun 2015-2017 (Rosyidin & Pattipeilohy, 2020: 154).

D. Simpulan

Sebagai negara yang memiliki sejarah yang sangat kuat di kawasan, Indonesia memiliki banyak dinamika yang berbeda-beda terhadap ASEAN. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN; secara umum memiliki keterkaitan kuat dengan organisasi tersebut, namun bukan berarti dari ASEAN berdiri sampai sekarang memiliki arah kebijakan luar negeri yang sama di setiap era pemerintahan. Setiap pemimpin memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap ASEAN sebagai organisasi regional. Soeharto, Megawati dan SBY memiliki pandangan yang cukup baik terhadap ASEAN, terutama sebagai lingkaran konsentris dari kebijakan luar negeri. Hal ini membuat arah

kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan ketiganya cenderung melihat ASEAN sebagai aktor penting di dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri. Suasana yang berbeda ditunjukkan oleh masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Jokowi. Ketiganya memiliki persepsi bahwa ASEAN bukan satu-satunya organisasi regional terpenting di kawasan ini, sehingga tidak melihat ASEAN sebagai lingkaran konsentris di dalam kebijakan luar negerinya. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa posisi Indonesia masih sangat strategis di kawasan Asia Tenggara sehingga keterlibatan Indonesia pada konstelasi kawasan Asia Tenggara masih cukup banyak.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna. (1994). "Indonesia's Foreign Policy After Cold War". Southeast Asian Affairs, 1994, halaman 146-163
- Drajat, G. M. (2019, September). The Continuity of ASEAN Centrality within Indonesian Foreign Policy under President JOKO Widodo. In Proceeding Of The 1st International Conference On Asean (IC-ASEAN) (p. 72).
- Emmers, Ralf. 2014. "Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership". The Pacific Review, 2014 Vol. 27, No. 4, 543-562, <http://dx.doi.org/10.1080/09512748.2014.924230>
- Gunadirja, et al. 1998. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1960-1965 (Buku IVB), (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1996)
- Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations. Foreign policy analysis, 1-30.
- Novotny, D. (2010). Torn between America and China: Elite perceptions and Indonesian foreign policy. Institute of Southeast Asian Studies.
- Patriadi, H. B., Hara, A. E., & Iqbal, M. (2018). Redefinition of national interest in Indonesian foreign policy under President Joko Widodo. In Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (pp. 258-275).
- Prihatyono, Agus. 2009. Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia tenggara melalui ASEAN Security Community . Jakarta : Tesis FISIP UI
- Rosyidin, M., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Regionalism under challenge: Ideas and Joko Widodo's foreign policy towards ASEAN, 2014-2019. JAS (Journal of ASEAN Studies), 8(2), 147-172.
- Syailendra, E. A. (2015). Consensual leadership in ASEAN: Will it endure under Jokowi. RSIS Commentary, 5.
- Weinstein, Franklin bernard. (1972). The Uses of Foreign Policy in Indonesia. Disertasi di Universitas Cornell. Disertasi dapat diunduh di proquest